



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MITIGASI RISIKO BENCANA ALAM

Rafika Sari

Peneliti Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat dari adanya peningkatan curah hujan dengan intensitas cukup tinggi sehingga memerlukan mitigasi untuk meredam risiko bencana. Penyebab peningkatan curah hujan ini adalah menghangatnya suhu muka laut di perairan Indonesia akibat La Nina dan pemanasan global. Fenomena alam La Nina kembali menguat sejak bulan Mei 2022 setelah sempat melemah pada bulan Januari 2022. Beberapa lembaga pengkajian iklim internasional memperkirakan La Nina ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2022, dan membuat La Nina terjadi di Indonesia selama tiga tahun.

Peningkatan curah hujan akibat La Nina memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Adapun lebih dari 90 persen bencana alam di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa beberapa provinsi di Indonesia berada dalam kategori waspada terhadap bencana hidrometeorologi basah, antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, yang disertai angin kencang atau angin topan dan gelombang laut tinggi. Wilayah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Fenomena La Nina di Indonesia juga berdampak pada mundurnya musim kemarau dari prakiraan sebelumnya. Sebanyak 47 persen wilayah zona musim (ZOM) terlambat masuk musim kemarau jika dibandingkan rerata klimatologis awal musim kemarau tahun 1991-2020. Sepertiga wilayah ZOM akan mengalami kondisi kemarau atas normal (musim kemarau lebih basah). Bencana hidrometeorologi basah ini menimbulkan kerugian ekonomi, di mana sektor pertanian, khususnya tanaman pangan merupakan sektor yang rentan terdampak kondisi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi bencana tersebut berdampak pada melonjaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk normalisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah akan memperluas jangkauan asuransi aset nasional sebagai mitigasi risiko bencana melalui pendanaan dan asuransi risiko bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance*, DRFI). Konsep resiliensi berkelanjutan ini disampaikan pada Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (*Global Platform for Disaster Risk Reduction*) yang berlangsung di Bali, 23-28 Mei 2022 untuk menjawab tantangan risiko sistemik terhadap bencana. Strategi DRFI dilakukan dengan mengatur pendanaan risiko bencana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mengalihkan risiko kepada pihak ketiga melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat. Skema dana bersama (*pooling fund*) terkait penanganan bencana dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 berasal dari APBN, APBD, swasta, lembaga keuangan, masyarakat hingga negara mitra untuk mitigasi bencana. *Pooling fund* ini untuk membiayai kegiatan penanganan bencana pada tahap pra dan pasca bencana. Mengingat keberadaan dana ini sangat penting, maka perlu pengaturan pengelolaan dana ini untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi kerawanan bencana yang besar, di mana sampai dengan 23 Mei 2022, sudah terjadi 1.613 bencana alam, termasuk gempa bumi, gunung api, tsunami. Daya tahan dan kesiapsiagaan Indonesia akan bencana sangat menentukan kerugian yang harus ditanggung, semakin tidak siap maka akan semakin besar kerugiannya. Pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa mendatang. Edukasi literasi cuaca dan iklim kepada masyarakat serta otoritas pemerintahan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko bencana. Kedepan, BMKG perlu didorong untuk dapat meningkatkan sistem dan respon peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis, yang didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi.

Atensi DPR

Perubahan iklim akibat fenomena La Nina dengan potensi dampak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 menjadi perhatian DPR RI dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan literasi cuaca dan iklim kepada masyarakat serta otoritas pemerintahan. Komisi V DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah dalam peningkatan sistem dan respon peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis, yang didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi. Mengingat APBN/APBD merupakan salah satu sumber dana bersama (*pooling fund*), tentunya perlu menjadi perhatian DPR RI dalam pelaksanaan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bersama Pengelolaan Bencana.

Sumber

Kompas, 27, 30, 31 Mei, & 2 Juni 2022;

Media Indonesia, 2 Juni 2022;

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, 31 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekuinbang
 Mandala Harefa
 Juli Panglima S
 Sri Nurhayati Q
 Sulasi Rongiyati
 Izzaty

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.